

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Permukiman

Menurut UU Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, permukiman merupakan suatu kawasan hunian yang terdiri dari beberapa perumahan beserta sarana prasarana penunjangnya yang terletak di perkotaan maupun perdesaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, 2011). Menurut Eko Budiharjo dalam Alfian (2014) permukiman bukan hanya membahas fisik dari suatu rumah saja melainkan membahas pula aspek- aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat seperti sosial, budaya, dan ekonomi. Permukiman juga tidak hanya membahas seberapa banyak rumah yang ada, melainkan membahas pula bagaimana kualitas hidup masyarakat yang ada di dalamnya.

Menurut Sastra M. et al. (2006) permukiman merupakan suatu kesatuan dari antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Permukiman merupakan sebuah system yang terdiri dari 5 (lima) elemen yang harus dipenuhi oleh setiap permukiman. Kelima elemen itu adalah:

A. Unsur Alam

Unsur alam merupakan unsur yang tak terlepas dari permukiman. Unsur alam terdiri dari berbagai hal, yaitu topografi, hidrologi, tanah, iklim, maupun unsur hayati seperti vegetasi dan fauna. Unsur alam ini biasa bermanfaat untuk membangun suatu permukiman dengan fungsi semaksimal mungkin.

B. Manusia

Manusia merupakan elemen pelaku utama kehidupan dalam suatu permukiman. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, pastinya membutuhkan berbagai hal yang menunjang kelangsungan hidupnya. Kebutuhan itu seperti kebutuhan biologis, perasaan serta kebutuhan emosional, persepsi, dan kebutuhan akan nilai moral.

C. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kesatuan dari sekelompok orang atau keluarga yang berada dalam suatu permukiman dan membentuk suatu komunitas tertentu.

Hal – hal yang berkaitan dengan masyarakat ini yaitu seperti:

- Kepadatan dan komposisi penduduk
- Kesehatan;
- Pendidikan;
- Hukum dan administrasi;
- Pengembangan ekonomi;
- Adat maupun kebudayaan; dan
- Kelompok sosial.

D. Bangunan dan Rumah

Bangunan dan rumah merupakan suatu tempat bagi manusia dalam melakukan aktifitasnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam rumah adalah semua bangunan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berkegiatan, contohnya adalah:

- Bangunan pelayanan seperti sekolah, rumah sakit, apotik, pos polisi, dan lain lain;
- Pusat transportasi;
- Pusat perbelanjaan;
- Area industri; dan
- Fasilitas rekreasi dan perbelanjaan.

E. Jaringan

Jaringan merupakan suatu sistem buatan maupun alami yang dapat mendukung berjalannya suatu permukiman. Jaringan yang dimaksud yaitu seperti:

- Sistem jaringan transportasi;
- Sistem jaringan listrik;
- Sistem jaringan air bersih;
- Sistem jaringan komunikasi;
- Sistem jaringan drainase dan air kotor; dan
- Tata letak fisik.

2.1.1 Permukiman Kumuh

Menurut adisasmita dalam Patrisia (2017) menyatakan bahwa pandangan masyarakat terhadap permukiman kumuh adalah suatu lingkungan yang tak lepas dengan jumlah penduduk yang banyak, tidak memadai dan mencukupinya fasilitas yang ada, masyarakat yang kurang mampu, keamanan yang kurang, kebersihan yang tidak terjaga, dan pandangan – pandangan negatif lainnya. Pernyataan ini sejalan dengan pengertian permukiman kumuh yang dikeluarkan oleh (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, 2011) dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, permukiman kumuh merupakan suatu kawasan hunian yang tidak layak huni akibat dari kurang sesuai dengan syarat – syarat yang ada seperti bentuk bangunan yang tidak teratur, tingginya tingkat kepadatan bangunannya, serta sarana prasarana dasar yang tidak layak dan tidak sesuai dengan standart yang sudah ditetapkan.

Permukiman kumuh sendiri terbentuk akibat dari tingginya daya tarik wilayah perkotaan yang mengundang masyarakat pedesaan untuk mencari nafkah di perkotaan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya permintaan akan lahan permukiman di wilayah perkotaan serta meningkat pula harga dari lahan yang ada. Dengan demikian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah akan menduduki lahan yang tidak peruntukannya, sehingga membentuk permukiman kumuh di perkotaan (Budiyono & Suryana, 2019).

2.1.2 Penanganan Permukiman Kumuh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring kata penanganan merupakan kata nomina atau kata benda yang berasal dari kata dasar tangan. Kata penanganan sendiri memiliki arti yaitu suatu proses, suatu cara, atau suatu kegiatan menangani suatu hal yang sedang dialami.

Dalam menangani permukiman kumuh, pemerintah daerah dapat menetapkan strategi maupun kebijakan sebagai langkah dalam meningkatkan kualitas permukiman di daerahnya. Setiap strategi maupun kebijakan yang dihasilkan haruslah memperhatikan aspek keadilan, budaya, sosial, ekonomi, serta kelayakan dari permukiman tersebut. Dalam membenahi kawasan permukiman,

pemerintah dapat belakukan perbaikan atau pemugaran kawasan tersebut, melakukan peremajaan, atau dengan melakukan relokasi permukiman tersebut ke daerah yang lain (Gobel, 2019).

Menurut UU Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, jenis – jeis dari peremajaan permukiman terbagi enjadi 3 yaitu perbaikan atau pemugaran, peremajaan, dan relokasi. Perbaikan atau pemugaran sendiri dilakukan dengan cara memperbaiki atau membangun perumahan yang ada menjadi yang lebih layak. Lain halnya dengan peremajaan. Peremajaan tidak hanya memperbaiki atau membangun perumahan saja, melainkan juga membangun lingkungan hunian menjadi lebih baik agar adanya rasa aman dan keselamatan bagi setiap masyarakat yang ada. Sedangkan relokasi dilakukan dengan memindahkan masyarakat yang terdampak akibat peremajaan ke lokasi yang lebih layak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, 2011).

2.1.3 Peremajaan Permukiman Kumuh

Peremajaan permukiman kumuh merupakan suatu kegiatan meningkatkan atau merubah suatu kawasan yang telah mengalami penurunan fungsi (Komarudin, 1997). Menurut UU Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, peremajaan dilakukan sebagai suatu kegiatan untuk membuat kondisi fisik rumah, perumahan, maupun permukiman menjadi lebih baik dan membuat rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, 2011).

Menurut Samidjo (2014), peremajaan permukiman kumuh memiliki 4 contoh tindakan, yaitu:

- A. Pembangunan kembali adalah suatu kegiatan penataan kembali suatu kawasan dengan merubah sebagian atau seluruh bangunan termasuk sarana prasarana. Dengan kegiatan ini, akan mengakibatkan perubahan struktur peruntukan laha, profil social, ekonomi, serta peraturan-peraturan yang mengatur kawasan tersebut.

- B. Rehabilitasi adalah suatu kegiatan yang mengembalikan kondisi suatu bangunan maupun unsur-unsur suatu kawasan yang telah rusak atau mengalami penurunan fungsi.
- C. Preservasi adalah suatu kegiatan pemeliharaan atau pelestarian lingkungan yang sudah ada, serta mencegah terjadinya penurunan fungsi atau kerusakan.
- D. Resettlement adalah suatu proses pemindahan penduduk dari suatu kawasan ke kawasan lain yang telah disiapkan, sesuai dengan aturan yang ada.

Sedangkan menurut Danisworo, (1988) dalam Rahmat & Djoeffan, (2019), terdapat 6 tipologi permukiman kota, yaitu:

- A. *Redevelopment*
Upaya penataan suatu kawasan kota dengan membangun ulang sarana prasarana yang sudah tidak layak.
- B. Gentrifikasi
Upaya peningkatan kualitas dari suatu lingkungan maupun bangunan tanpa merubah struktur fisik agar meningkatkan vitalitas suatu kawasan.
- C. Rehabilitasi
Mengembalikan kondisi suatu kota maupun bangunan yang telah mengalami degradasi maupun kerusakan, agar berfungsi secara optimal.
- D. Preservasi
Mencegah terjadinya kerusakan pada suatu lingkungan dengan cara melestarikan atau memelihara.
- E. Konservasi dan preservasi
Upaya melindungi, melestarikan memanfaatkan sumber daya dari suatu tempat, seperti kawasan budaya, cagar budaya, hutan lindung dan lain sebagainya
- F. *Resettlement*
Proses perpindahan penduduk dari tempat yang sudah tidak layak huni ke lokasi yang baru

Kesimpulan dari Sub Bab permukiman ini adalah permukiman merupakan suatu kawasan hunian beserta prasarana dan sarannya yang tidak

hanya berupa fisik saja melainkan beserta aspek sosial, ekonomi, dan dan budaya. Permukiman sendiri memiliki 5 (lima) elemen yang harus dipenuhi yaitu unsur alam, manusia, masyarakat, bangunan dan rumah, dan jaringan. Penanganan permukiman kumuh terbagi menjadi 3 yaitu perbaikan atau pemugaran, peremajaan, dan relokasi. Peremajaan permukiman sendiri terbagi kembali menjadi 6 (enam) yaitu pembangunan kembali, rehabilitasi, preservasi, dan resettlement, gentrifikasi, dan konservasi. Dalam penelitian ini, gentrifikasi dipakai sebagai bentuk peremajaan permukiman yang akan menjadi arahan penanganan.

2.2 Pariwisata

Menurut Sekretariat Negara Republik Indonesia (2009) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, wisata adalah semua kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan mengunjungi suatu tempat dengan tujuan berrekreasi, mempelajari keunikan, maupun pengembangan diri dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah segala kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang dibuat atau disediakan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah. Sedangkan menurut World Tourism Organization (2019) Pariwisata adalah suatu kegiatan perpindahan seseorang atau kelompok kesuatu tempat yang tidak biasa dengan tujuan pribadi maupun bisnis yang melibatkan aspek sosial, budaya dan ekonomi. Setiap kegiatan pariwisata pastilah memiliki tujuan wisata. Tujuan itu sering disebut juga destinasi wisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, destinasi wisata merupakan suatu wilayah yang memiliki daya Tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, serta adanya kerja sama dari setiap semua masyarakat setempat untuk mewujudkan kepariwisataan. Menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Bone (2019) jenis pariwisata ialah:

1. **Wisata Bahari**
Dikenal pula dengan nama wisata maritim. Jenis wisata ini biasanya identik dengan kegiatan olahraga air.
- 2 **Wisata Budaya**

Wisata ini bertujuan untuk menambah pandangan hidup seseorang dengan mempelajari kebiasaan masyarakat setempat.

3 Wisata Pertanian

Wisata Pertanian merupakan kegiatan perjalanan wisata ke area Pertanian.

4 Wisata Buru

Wisata Buru merupakan kegiatan berburu di area hutan yang dapat dijadikan tempat berburu.

5 Wisata Ziarah

Wisata ziarah merupakan kegiatan perjalanan wisata yang mempelajari tentang sejarah, adat, maupun kepercayaan masyarakat suatu daerah.

6 Wisata Cagar Alam

Wisata cagar alam merupakan kegiatan perjalanan wisata yang mengenal atau sekedar mengunjungi area konservasi.

7 Wisata Konvensi

Wisata konvensi merupakan kegiatan perjalanan wisata ke bangunan politik seperti Kantor MPR dan DPR di Senayan.

2.2.1 Desa Wisata

Menurut Admin (2020) Desa Wisata adalah suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah yang saling berinteraksi di bawah suatu pengelola, serta memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap peran bersama dengan menyesuaikan keterampilan individu yang berbeda. Desa Wisata sendiri terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu Desa Wisata rintisan, Desa Wisata berkembang, Desa Wisata maju, dan Desa Wisata mandiri (Teguh, 2020). Menurut Admin (2020) Komponen yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Desa Wisata adalah:

1. Kondisi desa sekarang.
2. Keadaan masyarakat serta struktur organisasi.
3. Konsep Desa Wisata yang unik.

Menurut Hadiwijoyo dalam Syafi'i & Suwandono (2015), menyatakan bahwa 7 (tujuh) hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk Desa Wisata adalah:

1. Aksesibilitas yang baik, sehingga mempermudah dikunjungi oleh wisatawan.
2. Memiliki obyek-obyek yang menarik yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata, seperti alam, seni budaya, legenda, makanan, dll.
3. Masyarakat serta aparat desa yang menerima serta mendukung Desa Wisata dan wisatawan yang datang.
4. Keamanan desa yang terjamin.
5. Tersedia akomodasi, tenaga kerja yang memadai, serta telekomunikasi yang baik.
6. Memiliki iklim sejuk ataupun dingin.
7. Terhubung dengan area wisata yang sudah dikenal oleh masyarakat.

Menurut Teguh (2020) dalam Strategi dan Program Desa Wisata ditengah Krisis Pariwisata, Strategi serta tahapan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan Desa Wisata adalah:

1. Penilaian, membuat perencanaan, serta menyusun program.
2. Mengembangkan SDM atau masyarakat setempat.
3. Mengembangkan destinasi wisata serta infrastrukturnya (Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi).
4. Mengembangkan atau merubah tata kelola serta manajemen dari Desa Wisata tersebut.
5. Promosi secara digital serta memasarkan Desa Wisata tersebut.

Desa Wisata memiliki beberapa indikator pendampingan yang dikeluarkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Deputi Bidang Industri Pariwisata Dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (2020) dalam Indikator Proses Bisnis Program Pendampingan Desa Wisata Berdasarkan Pemberdayaan Masyarakat. Indikator tersebut ialah:

Tabel 2. 1 Tabel indikator Desa Wisata

No	Kriteria	Sub Kriteria
1	Kepemilikan dan Kepengurusan oleh Masyarakat	Terdapat pengelolaan Desa Wisata yang efektif dan transparan
		Legalitas lembaga/keompok desa

No	Kriteria	Sub Kriteria
		Memiliki pengelolaan Desa Wisata yang efektif dan transparan
		Memiliki kemitraan Desa Wisata yang efektif
2	Kontribusi Terhadap Kesejahteraan Sosial	Menjaga martabat manusia
		Pembagian Biaya dan Keuntungan yang adil
		Memiliki jaringan ke ekonomi lokal dan regional
		Melestarikan dan memperkaya tradisonal dan budaya setempat
3	Kontribusi Untuk Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Melestarikan SDA
		Aktivitas Konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan
4	Mendorong Terjadinya Partisipasi Interaktif Antara Masyarakat Lokal dan Pengunjung (wisatawan)	Terdapat interaksi antara tamu dan masyarakat lokal
		Keberlanjutan produk-produk pariwisata berbasis masyarakat
5	Jasa Perjalanan Wisata dan Pramuwisata yang Berkualitas	Kualitas dan Keahlian pramuwisata Desa Wisata
		Memastikan kualitas perjalanan wisata
6	Kualitas Makanan dan Minuman	Kualitas Pelayanan makanan dan minuman
		Memastikan makanan dan minuman yang berkualitas
7	Kualitas Akomodasi (homestay)	Kualitas pelayanan akomodasi
		Memastikan pengelolaan akomodasi yang berkualitas
8	Kinerja Friendly Tour Operator (FTO)	Komitmen pada nilai-nilai ideal Desa Wisata
		Kontribusi terhadap perlindungan masyarakat dan alam
		Dukungan terhadap ekonomi lokal
		Mempromosikan indahnya penemuan, pengetahuan dan penghargaan
		Mempromosikan pengalaman yang memuaskan dan aman bagi wisatawan dan masyarakat

Sumber: (Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
Deputi Bidang Industri Pariwisata Dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, 2020)

2.2.2 Perencanaan Pariwisata

Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam melakukan perencanaan pariwisata menurut Setiyadi (2019), yaitu:

1. Aksesibilitas.
Unsur ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu
 - a. Aksesibilitas transportasi berupa jalan, kendaraan umum yang melayani dari dan menuju kawasan, maupun papan penunjuk arah menuju kawasan wisata.
 - b. Aksesibilitas informasi berupa informasi mengenai daya Tarik dari kawasan wisata, fasilitas yang dimiliki, informasi berupa promosi tempat wisata, maupun pusat informasi atau *Tourist Information Center (TIC)* yang ada di kawasan wisata.
2. Amenitas
Unsur ini berisikan tentang semua fasilitas yang dimiliki oleh kawasan wisata seperti toilet, tempat ibadah, area parkir, tempat makan maupun istirahat, maupun tempat membeli oleh-oleh. Unsur ini pula yang dijadikan sebagai acuan wisatawan dalam menentukan lama mereka berwisata.
3. Atraksi
Unsur ini sering dikenal pula dengan istilah 5W. 5W tersebut yaitu:
 - a. *What to do*
Apa saja yang dapat dilakukan di area wisata tersebut, artinya kegiatan apa saja yang dapat dilakukan Ketika wisatawan berkunjung ke area wisata tersebut.
 - b. *What to see*

Apa saja yang dapat dilihat di area wisata tersebut, seperti sisi alam, sisi budaya setempat, maupun hasil kreatifitas masyarakat setempat.

c. *What to buy*

Apa saja yang dapat dibeli dari area wisata tersebut, artinya apa saja barang yang dapat dibeli oleh wisatawan yang dapat dijadikan cinderamata dari area wisata tersebut.

d. *What to share*

Apa saja yang dapat dibagikan ke orang lain dari area wisata tersebut. Media sosial merupakan salah satu akses yang dapat mempromosikan suatu area wisata, maka ada apa saja yang dapat diabadikan lalu dibagikan melalui media sosial dari area wisata tersebut.

e. *What to Memorize*

Apa saja yang dapat diingat dari area wisata tersebut, artinya hal apa saja yang dapat menjadi pengingat oleh wisatawan mengenai area wisata tersebut.

2.2.3 Perencanaan Pariwisata Kota Singkawang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dinyatakan bahwa Kota Singkawang sebagai destinasi pariwisata yang akan berfokus pada peningkatan kesiapannya untuk menampung peningkatan kunjungan wisatawan. Selain itu direncanakan pula pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya, serta sejarah (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 ditegaskan pula bahwa Kota Singkawang ditetapkan sebagai *Gateway to Borneo* (Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, 2011).

2.2.4 Perencanaan Pariwisata Kawasan Sedau

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018 - 2023 dinyatakan bahwa Kawasan Pantai Pasir Panjang, Kota Singkawang dan sekitarnya sebagai sektor unggulan pariwisata, industri, dan perikanan (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2018). Dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018 - 2023 dinyatakan bahwa Kawasan Pantai Pasir Panjang, Kota Singkawang dan sekitarnya sebagai sektor unggulan pariwisata, industri, dan perikanan (Wali Kota Singkawang, 2018) menyatakan bahwa Kawasan Sedau akan dijadikan kawasan *Sedau Coastal Tourism* dan *Sedau Tourism Village*. Rencana ini dipertegas melalui peta rencana pengembangan kawasan potensial di Kota Singkawang pada lampiran 1 halaman 109.

Kesimpulan dari sub-bab pariwisata adalah pariwisata merupakan suatu kegiatan perpindahan seseorang maupun suatu kelompok ke suatu tempat yang tidak bisasa dengan tujuan pribadi maupun bisnis yang melibatkan aspek sosial, budaya dan ekonomi. Salah satu contoh dari tempat wisata adalah Desa Wisata. Desa Wisata sendiri memiliki pengertian yaitu suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah yang saling berinteraksi di bawah suatu pengelola, serta memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap peran bersama dengan menyesuaikan keterampilan individu yang berbeda. Kriteria dari pengembangan Desa Wisata menurut Admin (2020) adalah kondisi desa saat ini, keadaan masyarakat serta struktur organisasi, serta konsep yang unik. Sedangkan menurut Syafi'i & Suwandono (2015) kriteria yang harus terpenuhi dari Desa Wisata adalah aksesibilitas yang baik, memiliki obyek-obyek yang menarik, masyarakat serta aparat desa yang menerima serta mendukung Desa Wisata dan wisatawan yang dating, keamanan desa yang terjamin, ketersediaan akomodasi, tenaga kerja yang memadai, serta telekomunikasi yang baik, memiliki iklim sejuk ataupun dingin, terhubung dengan area wisata yang sudah dikenal oleh masyarakat.

2.3 Daerah Pesisir

Menurut Undang-Undang No. 27 tahun 2007, daerah pesisir adalah suatu daerah peralihan antar ekosistem laut dengan ekosistem darat yang dipengaruhi oleh perubahan di laut dan darat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, 2007). Hal ini sama seperti pendapat Ketchum (1972) dalam (Yonvitner et al., 2019) yang menyatakan bahwa daerah pesisir merupakan suatu daerah peralihan antara

laut dengan darat yang bagian daratnya masih dipengaruhi oleh aktifitas lautan, begitupun bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktifitas daratan.

Menurut Yonvitner et al. (2019) wilayah pesisir memiliki 2 (dua) karakteristik, yaitu: memiliki kekayaan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia, serta memiliki jenis topografi yang mudah untuk dikembangkan sehingga terdapat aksesibilitas yang baik pula. Dalam merencanakan pembangunan daerah pesisir, ada 6 (enam) hal yang perlu diperhatikan agar pembangunannya berkelanjutan (*sustainable*). 6 (enam) hal tersebut yaitu:

1. Wilayah pesisir merupakan bagian dari dunia yang memiliki ekosistem terproduktif.
2. Wilayah pesisir memiliki sumber daya hayati yang banyak yaitu seperti terumbu karang, ikan, mangrove, dll.
3. Wilayah pesisir selalu dipengaruhi oleh gaya dinamis yaitu seperti erosi, badai gelombang, naik turunnya permukaan air laut, dll.
4. $\frac{3}{4}$ kepadatan penduduk dunia ada di daerah pesisir.
5. Daerah pesisir diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lahan akibat pertumbuhan penduduk.
6. Daerah pesisir sangat cocok untuk pariwisata, penelitian, pelabuhan, dll.

Menurut Yonvitner et al. (2019), dalam mengolah wilayah pesisir, pemerintah perlu juga mengajak masyarakat sekitar untuk ambil andil dalam pengelolaan wilayahnya. Keikutsertaan masyarakat dalam mengolah wilayah pesisir akan bermanfaat untuk:

- Keberlanjutan sumber daya yang ada di pesisir, seperti ikan, mangrove, padang lamun, dll.
- Menghindari adanya pencemaran yang berlebihan agar melindungi kesehatan masyarakat.
- Meningkatkan manfaat dari sisi ekonomi yang didapat dari jasa lingkungan laut.
- Pengembangan bioteknologi dari sumber daya yang ada dipesisir yang dapat dijadikan sebagai produk kesehatan, kosmetik, produk konsumsi, dll.

- Meningkatkan perekonomian yang berbasis kepada masyarakat sekitar.
- Serta mempertahankan serta mengembangkan kearifan lokal bagi kelestarian pesisir.

Kesimpulan dari sub-bab daerah pesisir adalah daerah pesisir merupakan suatu daerah peralihan antar ekosistem laut dengan ekosistem darat yang dipengaruhi oleh perubahan di laut dan darat.



2.4 Penelitian Terdahulu

Selain berupa teori, penelitian-penelitian terdahulu juga dianggap penting. Penelitian- penelitian terdahulu ini berisikan 10 penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, agar dijadikan referensi. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi:

Tabel 2. 2 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah dan Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
1	Jonathan F Ijong, Veronica A Kumurur, Cynthia E V Wuisang “Penerapan Konsep Kota Berkelanjutan Pada Desain Kawasan Tepian Pantai Perkotaan Tahuna”	Rumusan masalah: Seringnya menghilangkan lingkungan alami dalam kegiatan pembangunan di Kota Tahuna, tanpa memberikan solusi perbaikan/lingkungan yang rusak akibat pembangunan tersebut. Tujuan: Memberikan suatu konsep serta strategi desain kota berkelanjutan terhadap perkotaan Tahuna.	4.3.1 Analisis Hasil Observasi <ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan • Kelemahan • Peluang • Ancaman 4.3.2 Analisa Literatur Kota <ul style="list-style-type: none"> • Penatagunaan • Menghormati batas • Interdependensi atau saling ketergantungan • Restrukturisasi ekonomi • Distribusi yang adil • Perspektif antargenerasi • Alam sebagai model sekaligus guru 	Deskriptif Kualitatif	1. Potensi yang dimiliki oleh kota Tahuna sebagai kota tepi pantai yang pengembangan kota ke arah kota berkelanjutan yang dapat menciptakan karakteristik serta meningkatkan citra kota yaitu kota tepian pantai yang berkelanjutan. 2. Karakteristik dalam keberagaman budaya Sangihe memiliki nilai lebih serta mengangkat citra kota yang unik serta dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari nilai kebudayaan yang perlu diketahui serta dilestarikan dalam bentuk desain arsitektural bangunan.

No	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah dan Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
			4.3.3 Analisa Kebutuhan Desain <ul style="list-style-type: none"> • Area Tangkapan Air/ Resapan Air • Ruang Terbuka Hijau • Energi Terbarukan • Bangunan Hijau 4.3.4 Analisa Desain <ul style="list-style-type: none"> • Tata Guna Lahan • Massa dan Bentuk Bangunan • Sirkulasi dan Area Parkir • Ruang Terbuka • Area Pedestrian/ Pejalan Kaki • Area Aktivitas Pendukung • Tindakan Pelestarian atau Pemeliharaan • Penanda 		3. Konsep berkelanjutan sendiri dapat memberikan suatu keharmonisan antara lingkungan binaan dengan lingkungan alami di lokasi penelitian yang dihasilkan dari produk urban design yang memberikan nilai tambah terhadap kawasan tepian pantai perkotaan Tahuna.
2	A.P. Dewi dan S. Sunarti “Keberadaan Permukiman Kumuh Tambak Lorok Kota Semarang terhadap Pengembangan	Rumusan masalah: Sering terjadinya bencana pesisir di daerah Tambak Lorok yaitu banjir dan rob. Selain itu terjadi pula menurunnya muka tanah di kawasan ini. Kawasan ini sering kali mendapatkan program untuk penataan	<ul style="list-style-type: none"> • Hunian • Kondisi jalan • Pengelolaan persampahan • Jaringan air bersih • Kondisi drainase • Kondisi sanitasi 	Kuantitatif	Kurang layaknnya serta kurang sehatnya kondisi permukiman di Tambak Lorok setelah adanya program penataan permukiman kumuh. Hal tersebut mengakibatkan belum siapnya permukiman di kawasan Tambak Lorok dalam mendukung program pemerintah yaitu menjadikan

No	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah dan Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
	Kampung Wisata Bahari”	permukiman kumuh. Selain itu adapula rencana pembangunan kampung wisata bahari di sekitar kawasan. Tujuan: Mengkaji keberadaan permukiman kumuh Tambak Lorok Kota Semarang terhadap pengembangan kampung wisata bahari.			kawasan tersebut menjadi salah satu tujuan wisata bahari. Kawasan Tambak Lorok masih membutuhkan perbaikan kembali dari berbagai aspek, yaitu dari aspek permukiman, jalan, drainase, sampah, sanitasi, air minum, dan juga fasilitas perdagangan.
3	Muhammad Rais dan Hariyanto “Strategi Pengembangan Wisata dengan Pendekatan Konsep Urban Community Based Tourism (UCBT) di Kawasan Teridentifikasi Kumuh Kampung	Rumusan masalah: Tambak Lorok merupakan kawasan permukiman kumuh yang sedang dikembangkan sebagai kampung wisata bahari di Kota Semarang. Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> Mengetahui kondisi penanganan permukiman kumuh di kawasan Tambak Lorok. 	4.1.1 Parameter penilaian kondisi fisik permukiman kumuh: <ul style="list-style-type: none"> Kondisi bangunan gedung Kondisi jalan lingkungan Kondisi penyediaan air minum Kondisi drainase lingkungan Kondisi pengelolaan air limbah Kondisi Pengelolaan Persampahan 4.1.2 Definisi Operasional Variabel UCBT lasifikasi aspek non-fisik	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kekumuhan mengalami penurunan yang mengindikasikan adanya perkembangan penanganan permukiman kumuh dengan persebaran kualitas permukiman yang didominasi oleh kumuh ringan di RW 12, 13, dan 15 sedangkan RW 14 sebagai kumuh sedang. Rata-rata responden yang setuju terhadap pentingnya

No	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah dan Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
	Bahari Tambak Lorok Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui kelayakan pariwisata dengan konsep Urban Community Based Tourism (UCBT) serta partisipasi masyarakat Tambak Lorok. Menganalisis strategi dalam pengembangan wisata bahari di kawasan Tambak Lorok dengan menerapkan konsep UCBT. 	<ul style="list-style-type: none"> Sosial Budaya Ekonomi Lingkungan Politik 		<p>masyarakat ikut dilibatkan dalam mengembangkan kawasan pariwisata ini adalah sebesar 3,82%. Hal ini mendukung penerapan konsep UCBT.</p> <ul style="list-style-type: none"> Arahan strategi yang dihasilkan adalah: pembentukan lembaga, eskalasi peran dan kemampuan masyarakat, optimalisasi infrastruktur dan aksesibilitas, diversifikasi atraksi wisata, promosi, kerjasama serta dukungan regulasi
4	Lina Nur Hidayati “Penataan Kawasan Tasik Agung Rembang Sebagai Desa Wisata Bahari Terpadu”	<p>Rumusan masalah: Bagaimana penata kawasan Tasik Agung menjadi kawasan Desa Wisata bahari terpadu yang dapat sekaligus memberikan keuntungan bagi masyarakat di kawasan Tasik Agung?</p> <p>Tujuan:</p>	<ol style="list-style-type: none"> Analisa perencanaan <ul style="list-style-type: none"> Alam Manusia Sosial Budaya Permukiman Aksesibilitas Analisa fungsi lahan Analisa pembagian zonasi Fungsi lahan dalam perencanaan Desa 	Kualitatif	Dari berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Tasik Agung, maka perlunya menjadikan kawasan ini sebagai sebuah Desa Wisata bahari terpadu yang memberikan berbagai atraksi yang menarik serta unik. Melalui pemanfaatan serta pemaksimalan potensi-potensi yang ada akan membuat kawasan ini menjadi

No	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah dan Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
		<ul style="list-style-type: none"> Membuat rancangan Desa Wisata bahari terpadu di Desa Tasik Agung. Menata kawasan permukiman dengan konsep Desa Wisata. 	Wisata 5. Analisa pembagian ruang 6. Analisa perhitungan lahan 7. Analisa konsep penekanan arsitektur		Desa Wisata bahari terpadu yang lebih bermanfaat.
5	Fendy Faizal Gobel “Konsep Penataan Kawasan Permukiman Desa Lemito”	Rumusan masalah: Kondisi kawasan permukiman di desa Lemito yang tidak layak huni sehingga perlunya penataan ruang di permukiman pesisir pantai ini. Tujuan: Menemukan konsep penataan kawasan permukiman kumuh dengan konsep berkelanjutan.	1. Pemanfaatan lahan,. 2. Intensitas kepadatan bangunan. 3. Tata bangunan. 4. Ruang terbuka dan vegetasi. 5. Aktivitas pendukung. 6. Tata sirkulasi sistem transportasi, sistem pergerakan di dalam kawasan, dan jalur pedestrian. 7. Tata informasi dan street furniture. 8. Jaringan utilitas. 9. Infrastruktur kawasan.	Deskriptif kuantitatif.	Konsep penataan kawasan permukiman desa Lemito dilakukan dengan 6 (enam) cara, yaitu rencana struktur peruntukan lahan, rencana intensitas pemanfaatan lahan, rencana tata bangunan, rencana sistem sirkulasi dan jalur penghubung, rencana tata kualitas lingkungan, serta rencana prasarana dan utilitas lingkungan.
6	Ilham Bagus Wiranto, Wafi Farhan Hermawan, Indy Farha Elya Hardiyanti, Nanta Andra Yoga, Piping	Rumusan masalah: Adanya permukiman kumuh di Kauman Jember Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui 	1. Kondisi lokasi ini merepresentasikan indikator kawasan kumuh berdasarkan lokasi dan kualitas lahan yang akan digunakan kawasan pemukiman yaitu didasarkan pada: a) Status legalitas tanah.	Kuantitatif	Standar indikator yang merepresentasikan tingkat kekumuhan suatu permukiman bisa dikategorikan ke dalam lima aspek yaitu: a). Kondisi Lokasi,

No	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah dan Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
	<p>Dwi K.</p> <p>“Implementasi Konsep Kampung Tematik sebagai Solusi Permukiman Kumuh di Kauman Jember”</p>	<p>karakteristik kawasan permukiman kumuh di daerah Kauman serta untuk mengkorelasikan dengan karakteristik Kawasan Wisata Jodipan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk membuat suatu konsep untuk peremajaan permukiman kumuh di Kauman serta di korelasikan dengan karakteristik Kawasan Wisata Jodipan. 	<p>b) Status penggunaan penguasaan lahan.</p> <p>c) Frekuensi bencana kebakaran.</p> <p>d) Frekuensi bencana tanah longsor.</p> <p>2. Kondisi Kependudukan merepresentasikan tingkat kepadatan penduduk yang berada di kawasan pemukiman kumuh yaitu didasarkan pada:</p> <p>a) Tingkat kepadatan penduduk.</p> <p>b) Rata-rata anggota rumah tangga.</p> <p>c) Jumlah KK per rumah.</p> <p>d) Tingkat pertumbuhan penduduk.</p> <p>3. Kondisi Bangunan merepresentasikan kualitas bangunan yang akan dijadikan tempat tinggal yaitu didasarkan pada:</p> <p>a) Tingkat kualitas struktur bangunan.</p> <p>b) Tingkat kepadatan bangunan.</p> <p>c) Tingkat kesehatan dan kenyamanan bangunan.</p> <p>d) Tingkat penggunaan luas lantai bangunan.</p> <p>4. Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar merupakan kebutuhan akan fasilitas umum dasar yang ada pada kawasan</p>		<p>b). Kondisi Kependudukan,</p> <p>c). Kondisi Bangunan,</p> <p>d). Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar,</p> <p>e). Kondisi Sosial ekonomi.</p> <p>Dalam perumusan dan penanganan permasalahan permukiman kumuh yang terjadi di kawasan Kauman Jember dapat diambil dari hasil komperatif dari kedua study case Kauman dan Jodipan. Secara historis dan kondisi fisik kedua wilayah tersebut memiliki beberapa kesamaan antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki jembatan penghubung dari sungai, • Dekat dengan kawasan rel kereta api, • Terdapat sungai, • Termasuk wilayah perkotaan, • Dekat dengan pasar, • Mempunyai latar belakang karakteristik yang sama

No	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah dan Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
			<p>kumuh sehingga penilaian yang dilakukan adalah tentang layak atau tidaknya dan jumlahnya telah memenuhi syarat atau tidak yaitu didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tingkat pelayanan air bersih. b) Kondisi sanitasi lingkungan. c) Kondisi persampahan. d) Kondisi saluran air hujan (drainase). e) Kondisi jalan. f) Besarnya ruang terbuka hijau. <p>5. Kondisi Sosial ekonomi menggambarkan tingkat kesejahteraan yang ada di kawasan kumuh yaitu didasarkan pada;</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tingkat kemiskinan. b) Tingkat pendapatan. c) Tingkat pendidikan. d) Tingkat kerawanan keamanan. 		<p>yaitu sosial, ekonomi, dan budaya. Persamaan tersebut dapat di implementasikan dalam progam dan konsep dipadukan pada indikator yang ditentukan.</p>
7	<p>Muhammad Syafi'I dan Djoko Suwandono</p> <p>“Perencanaan Desa Wisata Dengan</p>	<p>Rumusan masalah: Bagaimana arahan pengembangan Desa Bedono sebagai Desa Wisata berbasis pada Community Based Tourism?</p>	<p>1. Analisis Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek Lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atraksi wisata dan atraksinya. ▪ Infrastruktur. ▪ Sarana transportasi. ▪ Sosial: 	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>1. Desa Bedono memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi Desa Wisata karena adanya potensi atraksi wisata alam seperti pantai dan ekosistem</p>

No	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah dan Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
	<p>Pendekatan Konsep Community Based Tourism (CBT) Di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak”</p>	<p>Tujuan: Untuk memberikan rekomendasi pengelolaan serta pengembangan Desa Wisata di kawasan pesisir Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dengan konsep Community Based Tourism.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elemen kelembagaan. ▪ Ekonomi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akomodasi. ▪ Perdagangan barang dan jasa. <p>2. Analisis SWOT.</p>		<p>mangrove, serta makam Syeikh Abdullah Mudzakir serta didukung oleh pemerintah desa untuk pembentukan Desa Wisata. Hal tersebut terhalang oleh kesiapan dari SDM yaitu masyarakat sekitar yang masih perlu ditingkatkan serta perlunya dibentuk lembaga atau organisasi masyarakat pendukung pariwisata seperti kelompok sadar wisata.</p> <p>2. Terlibatnya masyarakat dalam pembentukan Desa Wisata adalah sebagai salah satu langkah untuk memberdayakan masyarakat desa serta untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove yang ada serta pelestarian nilai budaya serta religi yang berlaku di tengah masyarakat.</p>
8	<p>Muhammad Ahrishar dan Haryo Sulistyarso</p>	<p>Rumusan masalah: Adanya permukiman kumuh di Kelurahan Kuin Utara</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan estetika kawasan permukiman tepi sungai berupa: <p>1. Orientasi terhadap bangunan.</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Arahan penataan kawasan yang telah dirumuskan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan serta

No	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah dan Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
	<p>“Arahan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin sebagai Upaya Pembentukan Identitas Kawasan”</p>	<p>sesuai dengan adanya penetapan SK Walikota Banjarmasin No. 460 Tahun 2015 menyatakan bahwa kawasan ini mulai mengalami penurunan estetika. Hal ini cukup memprihatinkan karena Kampung Kuin merupakan salah satu kawasan tradisional yang masih menerapkan budaya kehidupan di sungai.</p> <p>Tujuan: Merumuskan arahan penataan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Kuin Utara sebagaimana berupaya memberikan karakter khusus terhadap potensi yang dimiliki kawasan ini.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penerapan arsitektur tradisional. 3. Keberadaan area service pada kegiatan pemanfaatan sungai. 4. Keberadaan dermaga untuk akses transportasi sungai. 5. kepadatan serta tata bangunan. 6. Fungsi kegiatan bangunan rumah. 7. Jalur Pedestrian lokal sebagai jalur sirkulasi. 8. Ruang terbuka dan rekreasi tepi sungai. 9. Pencemaran kawasan bantaran sungai. 10. Prasarana jalan lingkungan. 11. Jaringan prasarana dasar. 12. Prasarana MCK. 13. Sarana permukiman. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identitas dan citra kawasan permukiman tepi sungai <ol style="list-style-type: none"> 1. Path. 2. Edge. 3. District. 4. Node. 5. Landmark. 6. Kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat setempat yang khas. 7. Warisan sejarah. 		<p>peremajaan fisik bangunan yang berorientasi terhadap sungai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman tepi sungai. • Pengembangan sarana prasarana kawasan yang dapat menunjang perkembangan kawasan sebagai kampung wisata.

No	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah dan Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
			8. Potensi artefak fisik lokal dan fisik dasar.		
9	Yuwananabdha Syahbi Syagata dan Rina Kurniati “Peremajaan Kawasan Kampung Bandeng Tambakrejo Semarang berdasarkan Preferensi Kelompok Usaha Masyarakat”	Rumusan masalah: Kampung Bandeng Tambakrejo mengalami penurunan kualitas secara fisik maupun aktifitas. Proses produksi olahan bandengpun terganggu akibat keadaan fisik serta alam yang tidak memadai. Tujuan: Menentukan arahan peremajaan kawasan kampung bandeng Tambakrejo berdasarkan preferensi kelompok usaha masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bina Sosial: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan. 2. Jalan lingkungan. 3. Drainase. 4. Air bersih. 5. Air limbah. 6. Persampahan. 7. Kebakaran. ▪ Bina Lingkungan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fisik (Sarana, Prasaran, Utilitas). 2. Non-fisik (Atraksi Kampung Bandengan dan Pemasaran). ▪ Bina Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis zonasi. 	Kualitatif	Arahan peremajaan kampung bandeng ini adalah menggunakan pendekatan kepada masyarakat. Kawasan tersebut terbagi menjadi 5 zonasi yang akan diremajakan, yaitu: zona permukiman yang menampung masyarakat yang terdampak peremajaan kawasan, zona perdagangan dan jasa terdapat pada jalan arteri sekunder, zona produksi dan edukasi sesuai dengan preferensi masyarakat terletak di jalan Tanggungrejo Raya, serta Zona Ruang Terbuka publik guna meningkatkan bina sosial dalam peningkatan kegiatan sosial kemasyarakatan.
10	Sutrisno, Andi Irwan, Muh. Ramli “Analisis Tingkat Kekumuhan Dan Peningkatan	Rumusan masalah: Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 648/440 tahun 2014 Desa Torokeku merupakan salah satu kawasan	Formula penilaian lokasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 dengan mempertimbangkan delapan kriteria yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi bangunan hunian. 	Deskriptif kuantitatif	Tingkat kekumuhan permukiman pesisir di Desa Torokeku masuk dalam kategori kumuh sedang. Hal ini disebabkan oleh kondisi kepadatan bangunan yang cukup tinggi dan banyaknya rumah yang

No	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah dan Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
	<p>Permukiman Pesisir Di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan”</p>	<p>permukiman yang teridentifikasi sebagai permukiman kumuh. Desa Torokeku berada di permukiman nelayan atau berada di kawasan pesisir/tepi laut.</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kekumuhan Permukiman Pesisir di Kabupaten Konawe Selatan. 2. Upaya peningkatan kualitas permukiman pesisir di Kabupaten Konawe Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kondisi jalan lingkungan. 3. Kondisi penyediaan air minum. 4. Kondisi pengolahan air limbah. 5. Kondisi pengolahan sampah. 6. Kondisi proteksi kebakaran. 7. Kondisi lingkungan pesisir. 8. Kondisi resiko bencana pesisir. 		<p>tidak layak huni, kondisi jalan lingkungan yang rusak dan belum menjangkau kesuluruh rumah, kondisi air bersih yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat, tidak adanya sarana pengolahan air limbah, tidak adanya sarana pengolahan sampah, tidak adanya sarana proteksi kebakaran serta berkurangnya ekosistem mangrov. Peningkatan kualitas Permukiman dilakukan melalui rehabilitasi dan pembangunan rumahan di lokasi baru; perbaikan dan peningktan sarana dan prasarana umum seperti jalan lingkungan, air bersih, pengolahan air limbah, pengolahan sampah, dan sarana proteksi kebakaran; serta melalui pemulihan kerusakan ekosistem mangrove.</p>

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2022.

Kesimpulan dari sub-bab penelitian terdahulu didapatkan variable yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah kondisi bangunan hunian, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengolahan air limbah, kondisi pengolahan sampah, kondisi proteksi kebakaran, kondisi lingkungan pesisir, kondisi resiko bencana pesisir.

2.5 Sintesa Pustaka

Sintesa pustaka dari penelitian ini adalah:

Tabel 2. 3 Tabel Sintesa Pustaka

No	Sumber	Variable
1	Sub-bab Pariwisata oleh Admin, (2020)	Kondisi desa sekarang
2	Sub-bab Pariwisata oleh Admin, (2020)	Keadaan masyarakat serta struktur organisasi
3	Sub-bab Pariwisata oleh Admin, (2020)	Konsep Desa Wisata yang unik
4	Penelitian terdahulu Analisis Tingkat Kekumuhan Dan Peningkatan Permukiman Pesisir Di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan	Kondisi bangunan hunian
5	Penelitian terdahulu Analisis Tingkat Kekumuhan Dan Peningkatan Permukiman Pesisir Di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan	Kondisi jalan lingkungan
6	Penelitian terdahulu Analisis Tingkat Kekumuhan Dan Peningkatan Permukiman Pesisir Di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan	Kondisi penyediaan air minum
7	Penelitian terdahulu Analisis Tingkat Kekumuhan Dan Peningkatan Permukiman Pesisir Di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan	Kondisi pengolahan air limbah

No	Sumber	Variable
8	Penelitian terdahulu Analisis Tingkat Kekumuhan Dan Peningkatan Permukiman Pesisir Di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan	Kondisi pengolahan sampah
9	Penelitian terdahulu Analisis Tingkat Kekumuhan Dan Peningkatan Permukiman Pesisir Di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan	Kondisi proteksi kebakaran
10	Penelitian terdahulu Analisis Tingkat Kekumuhan Dan Peningkatan Permukiman Pesisir Di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan	Kondisi lingkungan pesisir
11	Penelitian terdahulu Analisis Tingkat Kekumuhan Dan Peningkatan Permukiman Pesisir Di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan	Kondisi resiko bencana pesisir

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2022.